



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDHA TRIWIDYA S., S.Sos, MSi
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. M. IRSYAD YUSUF, SE., MMA.
Jabatan : Bupati

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. M. IRSYAD YUSUF, SE., MMA.

Pasuruan, 29 Januari 2016

PIHAK PERTAMA



YUDHA TRIWIDYA S., S.Sos, Msi

Bembina Tingkat I

NIP. 197405171993111001

PERJANJIAN KINERJA

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
: 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan	Persentase jumlah masyarakat dari semua elemen yang telah mengikuti pembinaan dan sosialisasi kebangsaan	%	35
2	Terwujudnya Forum Antar Umat Beragama (FAUB)	Jumlah penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama (FAUB)	kali	3
3	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada Ormas/LSM dan elemen masyarakat	Persentase penyelenggaraan penyuluhan yang efektif	%	20
4	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam antisipasi dan penyelesaian kasus	Persentase penurunan konflik dan tindak kriminalitas	%	2
5	Meningkatnya kesadaran hukum dan penghormatan HAM di masyarakat dan aparat pemerintah	Persentase penurunan konflik pelanggaran HAM	%	2
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan politik dan penyelenggaraan proses demokrasi	1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat	%	60
		2. Penguatan kelembagaan politik dan indeks demokrasi	%	50

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	549.991.100	APBD
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	115.524.500	APBD
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	270.038.900	APBD
4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	219.933.300	APBD
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	706.611.200	APBD
6	Program Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM	100.195.000	APBD
7	Program Perbaikan Proses Politik	146.313.800	APBD
8	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	469.067.200	APBD
TOTAL		2.577.675.000	



H. M. IRSYAD YUSUF, S.E, MMA.

Pasuruan, 29 Januari 2016



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, MSi

Pembina Tingkat I

Nip. 197205171993111001